

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Edi Subiyanto, 2014, *Yurisprudensi Hukum Acara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, SETARA Pres (Kelompok Instans Publishing).
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media & Penerbit Nuansa.
- Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja, 2011, *Demokrasi, HAM, & Konstitusi (Prespektif Negara Bangsa Untuk menghadirkan Keadilan)*. Malang. Setara Pres.
- Ilhan Yulis Isdianto, 2016. *Prinsip Umum Demokrasi & Pemilu*. Sleman Indie Book Corner.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Konstitusi & Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta, The Biography Institute.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Maruar Siahaan, 2012. *Hukum Acara MK RI*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Thafa Media.
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (gagasan perluasan konstitusi MK)*, Jogjakarta. UII Pres.

Rambe Kamarul Zaman, 2016, *Perjalanan Panjang Serentak*, Jakarta, ekspos (PT Mizan Publika).

Samsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah mengawasi pemilihan umum kepala daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri barbar*. Bantul.

Thahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta Selatan, PT Mizan Publika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

R.I., Undang-Undang Dasar 1945

R.I., Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

R.I., Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota.

R.I., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang penegelolaan dana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

R.I., Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHU.BUP-XIV/2016

Artikel.

Deden Fatur Rahman, “*Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*”. ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/280/293. Di unduh pada hari senin, tanggal 5 Desember 2016, Pukul 15:00 WIB.

Mahfud MD. “*Kelirumologi Keadilan Substantif*”. <https://profmahfud.wordpress.com/tag/keadilan-substantif/>. Diunduh pada hari Senin, tanggal 12 April 2017, Pukul 03:00 WIB.

Website.

<http://news.liputan6.com/read/2215484/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2015>. Diunduh pada hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2016. Pukul 22:00 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/26/063739564/mk-hanya-terima-tujuhgugatan-sengketa-pilkada-2015>. Diunduh pada hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2016. Pukul 23:00 WIB.

<http://id.kpusurabayakota.go.id/independensi-perilaku-utama-penyelenggara-pemilu/>. Diunduh pada hari rabu, tanggal 7 Desember 2016. Pukul 13:00 WIB.